

## Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan

Sukardi Samad<sup>1</sup>, Abdulrahman Senuk<sup>2</sup>, Musdar Muhammad<sup>3\*</sup>

<sup>1,2,3</sup> Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun, Indonesia

E-mail: [sukardisamad98@gmail.com](mailto:sukardisamad98@gmail.com)<sup>1</sup>, [abdsenuk@unkhair.ac.id](mailto:abdsenuk@unkhair.ac.id)<sup>2</sup>, [musdar@unkhair.ac.id](mailto:musdar@unkhair.ac.id)<sup>3\*</sup>

Alamat Kampus: Jl. Jusuf Abdulrahman, Kel. Gambesi Kotak Pos 53, Ternate, Kode Pos 97719

Korespondensi penulis: [musdar@unkhair.ac.id](mailto:musdar@unkhair.ac.id)

**Abstract.** *This research was conducted with the aim of knowing the level of community participation in development planning in North Tidore Subdistrict, Tidore Islands City and to find out the factors that influence the level of community participation in development in North Tidore Subdistrict, Tidore Islands City. the research approach used in this research is descriptive qualitative research, which is a research that aims to provide a systematic, factual and accurate description of the data in the field about community participation in development planning in North Tidore Subdistrict. Data collection is done by interview, observation, literature study. Based on the results of the research conducted, it can be said that community participation in development in North Tidore Subdistrict is still classified as moderate, this can be seen from the attendance list of Musrenbang participants at the Kelurahan / Village level in North Tidore Subdistrict.*

**Keywords:** *Participation, Community, Development Planning*

**Abstrak.** *Penelitian ini dilakukan dengan tujuan Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan. pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Tidore Utara. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara, wawancara, observasi, Studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Tidore Utara masih tergolong sedang hal ini dapat di lihat dari daftar kehadiran peserta Musrenbang di tingkat Kelurahan/ Desa di Kecamatan Tidore Utara.*

**Kata kunci:** *Partisipasi, Masyarakat, Perencanaan Pembangunan.*

### 1. LATAR BELAKANG

Partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan untuk mencapai sesuatu yang secara sadar diinginkan oleh pihak yang berkepentingan. Partisipasi dalam pengembangan masyarakat melibatkan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, evaluasi dan penikmatan hasil atau upaya perubahan masyarakat yang direncanakan untuk mencapai tujuan masyarakat (Saharuddin dan Sumardjo,2003). Partisipasi merupakan peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan seperti waktu, keahlian, tenaga, modal dan pikiran (Sumaryadi 2005).

Perencanaan pembangunan partisipasi merupakan hal yang sangat penting, hal tersebut sejalan dengan pendapat Conyers (dalam Supriatna, 2000) mengemukakan tiga (3) alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan mempunyai sifat yang sangat penting: 1). Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi dan atau sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. 2). Pembangunan akan mempercayai proyek atau program pembangunan mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut. 3). Timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Paradigma pembangunan sekarang ini pemberdayaan masyarakat dan partisipasi merupakan strategi pembangunan yang bertumpu pada rakyat (*peopel centered development*). Strategi ini menyadari pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal, melalui kesanggupan atas kontrol internal terhadap sumber daya material dan non-material yang penting melalui redistribusi modal atau kepemilikan.( Adimiharja, 2003).

Untuk pengembangan partisipasi masyarakat, perlu pemahaman dasar mengenai tingkatan partisipasi. Menurut Cohen dan Uphoff dalam Soetomo (2008), membagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan ke dalam 4 tingkatan, yaitu: (a) Partisipasi dalam perencanaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan dan penetapan program pembangunan dan sejauh mana masyarakat memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk saran untuk pembangunan. (b) Partisipasi dalam pelaksanaan dengan wujud nyata partisipasi berupa: partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk uang, partisipasi dalam bentuk harta benda. (c) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, yang diwujudkan keterlibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tingkatan ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun. (d) Partisipasi dalam evaluasi, yang diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya. Penilaian ini dilakukan secara langsung, misalnya dengan ikut serta dalam mengawasi dan menilai atau secara tidak langsung, misalnya memberikan saran-saran, kritikan atau protes. Selanjutnya Adisasmita (2006), mengungkapkan bahwa penentuan program pembangunan oleh masyarakat yang bersangkutan merupakan bentuk perencanaan dari bawah, dari akar rumput bawah atau sering disebut sebagai *bottom-up planning*. Peningkatan partisipasi

masyarakat adalah salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat. Peran masyarakat dalam pembangunan.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan Potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, selain perhatian di harapkan pada aspek keadilan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasil, hendaknya pembangunan juga berorientasi pada kepentingan masyarakat yang betul-betul sesuai dengan apa yang di butuhkan dan dirasakan oleh mereka. Demikian pula halnya dengan pembangunan di kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, nampaknya masi memiliki kekurangan karena masih minimnya masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan, kehadiran masyarakat menjadi sangat penting karena dapat menentukan pembangunan apa yang cocok dan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.

Berdasarkan hal di atas, berbagai hal diusahakan oleh pemerintah Kecamatan Tidore Utara berupa penyediaan bantuan yang menunjang kegiatan masyarakat, perumusan kebijakan yang dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta dalam program pelaksanaan pembangunan. Pemberian kreatifitas, dan motivasi bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan, maka tujuan penelitian; untuk mengetahui tingkat partisipasi Masyarakat dan serta menguraikan apa saja factor-faktor yang mempengaruhi partisipasi Masyarakat dalam perencanaan Pembangunan di kecamatan Tidore Utara

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **2.1 Partisipasi**

Partisipasi sebernarnya berasal dari bahasa inggris yaitu dari kata "*participation*" yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan di ikut sertakan atau mengambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Sedangkan dalam kamus

lengkap bahasa Indonesia “partisipasi” berarti hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan keikutsertaan.

Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 (penjelasan pasal 2 ayat 4 huruf d) partisipasi masyarakat diterjemahkan sebagai keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Perencanaan partisipatif saat ini terdorong dengan adanya otonomi daerah. Salah satu upaya pemerintah daerah mewujudkan perencanaan partisipatif adalah dengan Musrenbang. Musrenbang dilaksanakan mulai dari tingkat kelurahan/desa sampai dengan tingkat nasional. Selanjutnya Slamet (2003) menyatakan bahwa, partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Mardijono (2008), mengemukakan partisipasi diartikan sebagai upaya peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan. Lebih lanjut dijelaskan partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam program-program pembangunan.

## 2.2 Pengertian Masyarakat

Kata masyarakat dalam bahasa Inggris di Identikkan dengan *Society* (Latin) “*Society*” yang berarti kawan. Pengertian ini ternyata sesuai dengan kenyataan bahwa Masyarakat itu tidak daripada sekelompok manusia yang saling berhubungan dan bergaul. Berkaitan dengan pengertian tersebut Ralph Lington Kemudian menjelaskan sebagai berikut: “Masyarakat adalah merupakan kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang telah di tentukan.” (Ibid.:29).

Berdasarkan pengertian ini maka dapat dipahami bahwa untuk dapat dikatakan sebagai masyarakat maka harus merupakan kelompok manusia yang telah bermukim dan bekerja sama dalam suatu wilayah (tempat) tertentu. Lebih lanjut kemudian dijelaskan oleh Koentjaraningrat bahwa: “Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berintegrasi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terkait oleh suatu identitas bersama.” (M. Cholil Mansyur, 1989).

Masyarakat mengandung pengertian suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang sangat luas sifatnya. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh rasa identitas bersama (Koentjaraningrat. 2000). Masyarakat adalah sekelompok orang yang

memiliki perasaan sama, menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama (Suharto, Edi. 2006).

Soekanto (2005), Masyarakat merupakan suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan pengolahan dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan manusia. Kemudian masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan berkerja cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka suatu kesatuan sosial dengan batasan-batasan yang dirumuskan. Dapat di simpulkan masyarakat itu adalah suatu system, kesatuan manusia yang memiliki suatu interaksi, kebiasaan (adat-istiadat), tata cara hidup bersama yang hidup dengan batasan-batasan (aturan-aturan) dan menganggap diri mereka suatu kesatuan sosial yang bersifat kontinyu dan terikat.

### **2.3 Partisipasi Masyarakat**

Menurut Siahaan (2002), partisipasi masyarakat memiliki keuntungan sosial, politik, planning dan keuntungan lainnya, yaitu: 1. Dari pandangan sosial, 2. Dari segi politik, 3. Dari segi planning.

Sementara itu menurut Sanoff (2000), tujuan utama partisipasi adalah:

1. Untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan desain keputusan;
2. Untuk melengkapi masyarakat dengan suatu suara dalam membuat desain keputusan untuk memperbaiki rencana;
3. Untuk mempromosikan masyarakat dengan membawanya bersama sebagai bagian dari tujuan umum. Dengan partisipasi, masyarakat secara aktif bergabung dalam proses pembangunan, lingkungan fisik yang lebih baik, semangat publik yang lebih besar, dan lebih puas hati.

### **2.4 Perencanaan Pembangunan**

Definisi perencanaan pembangunan tersebut diambil makna tentang apa yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan dan tahap-tahap yang didalamnya. Kemudian hubungannya dengan konsep pembangunan daerah sebagai tempat proses perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah atau daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai

sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tapi tetap berpegang teguh pada azas skala prioritas (Bratakusumah, 2004).

Dari definisi tersebut mempunyai makna proses perencanaan pembangunan melibatkan para aktor yang berinteraksi pada tingkatan berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan aspek-aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek-aspek lingkungan lainnya dengan cara yang sistematis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat didaerah dapat ditangkap secara berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks, sehingga prosesnya harus memperhatikan kemampuan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya alam, keuangan, serta sumber-sumber daya yang lainnya. (Jensen,1995). Perencanaan Pembangunan Pengertian perencanaan pembangunan dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang membentuknya yaitu: perencanaan dan pembangunan.

## **2.5 Musyawarah Perencanaan Pembangunan**

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) telah menjadi istilah yang sangat populer dalam proses perencanaan pembangunan. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 21 bahwasannya musrenbang menjadi forum bagi antar pelaku kepentingan dalam menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 2 yang menjelaskan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Dengan memiliki jenjang perencanaan yang berbeda, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yaitu perencanaan jangka panjang daerah yang disingkat RPJPD untuk periode 20 tahun (pasal 1 ayat 9), selanjutnya rencana jangka menengah daerah yang disebut RPJMD untuk periode 5 tahun (pasal 1 ayat 12) , maupun rencana jangka pendek atau tahunan yaitu rencana kerja pemerintah daerah yang biasa disebut RKPD 1 tahun (pasal 1 ayat 16).

Laksana (2012), Musrenbang sebagai implementasi Perencanaan Partisipatif Musrenbang dilaksanakan di setiap tingkatan, mulai tingkat kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat nasional. Musrenbang pada tingkat kabupaten kota merupakan forum bagi pemangku kepentingan daerah untuk menampung aspirasi stakeholder untuk membahas prioritas pembangunan di daerah yang selanjutnya menjadi masukan bagi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Musrenbang kelurahan/desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilakukan di tingkat paling bawah untuk mendapatkan usulan usulan yang berasal dari masyarakat dalam rangka menentukan arah pembangunan yang akan dikerjakan, nantinya menjadi masukan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) pada tahun berikutnya. Keterlibatan masyarakat menjadi unsur yang sangat penting dalam proses pembangunan. Setelah sekian lama proses kebijakan pembangunan dilakukan secara *topdown*, penentuan kebijakan pembangunan berasal dari atas (pejabat yang berwenang) tanpa mengikutsertakan masyarakat dan stakeholder yang lainnya, maka akibatnya banyak ditemukan masyarakat tidak memiliki dan tidak dapat merasakan manfaat dari kegiatan pembangunan yang telah berjalan.

## **2.6 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan**

Upaya pembangunan yang terencana dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang dilakukan. Lebih jauh lagi bahwa pembangunan yang tepat sesuai dengan kondisi di suatu wilayah menjadi syarat mutlak dilakukan suatu pembangunan. Perencanaan ada sebagai upaya untuk mengantisipasi ketidak seimbangan yang terjadi. Artinya perubahan pada suatu keseimbangan awal dapat mengakibatkan perubahan pada suatu sistem sosial yang akhirnya membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan awal. Perencanaan sebagai bagian dari fungsi manajemen yang bila ditempatkan pada pembangunan akan berperan sebagai arahan bagi proses pembangunan berjalan menuju tujuan, disamping itu akan menjadi tolok ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilaksanakan.

Menurut Huraerah (2008), Keberhasilan suatu pembangunan tidak dapat di lepaskan dari adanya partisipasi anggota masyarakat baik sebagai satu kesatuan system maupun individu yang merupakan bagian yang sangat penting dalam proses dinamika pembangunan. Karena secara prinsip pembangunan di tujukan guna menjadikan masyarakat sejahtera oleh sebab itu tanggung jawab berhasil tidaknya pembangunan tidak hanya di tangan pemerintah tetapi juga masyarakat. Oleh karena itu kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat merupakan salah satu keberhasilannya pembangunan.

## **2.7 Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan**

Keberhasilan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan Kelurahan/ Desa pada khususnya tidak saja ditentukan oleh pemerintah dan aparatnya melainkan juga oleh besarnya pengertian, kesadaran dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Menurut Slamet (2003), menyatakan bahwa, partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan- kegiatan pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Hal senada juga di ungkapkan Adisasmita (2006) bahwa partisipasi anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal.

Dewasa ini diharapkan partisipasi masyarakat akan muncul dan tumbuh dari bawah sebagai inisiatif dan aktifitas yang lahir dari rasa tanggung jawab warga masyarakat dalam pembangunan pedesaan / kelurahan yang pada partisipasinya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Dalam keputusan Presiden Republik Indonesia dengan nomor :319/19/1978 dijelaskan bahwa: “Berhasil tidaknya realita akan tergantung pada banyaknya tanggapan pengertian dan partisipasi rakyat Indonesia dalam meyambut segala tantangan pembangunan ini secara positif guna meratakan jalan bagi cucu dan generasi yang akan datang untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila.” (Sirajuddin 1991).

Dari penjelasan itu dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pembangunan yang dilaksanakan selama ini mengarah pada peningkatan kesejahteraan hidup di masa yang akan datang terutama bagi generasi penerus. Tanggapan, pengertian dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan akan mempercepat terelisasi suatu tujuan. Hal itu dimungkinkan karena potensi besar dalam pembangunan tergantung banyak pada potensi sumber daya manusia dan memiliki kemampuan yang besar pula. Bryant dan White (2008), menyatakan bahwa partisipasi masyarakat didorong melalui (1) proyek pembangunan bagi masyarakat desa yang dirancang sederhana dan mudah dikelola oleh masyarakat; (2) organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang mampu menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan (3) peningkatan peranan masyarakat dalam pembangunan.

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi pustaka yang selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif. Tempat dan lokasi terdapat di kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan. Teknik analisis data merupakan pendekatan kualitatif Deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah peneliti bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah, dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007)

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kecamatan Tidore Utara

##### a. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Keberhasilan suatu proses pembangunan tidak dapat dilepaskan dari adanya partisipasi anggota masyarakatnya, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu yang merupakan bagian yang sangat integral yang sangat penting dalam proses dinamika pembangunan, karena secara prinsip pembangunan ditunjukkan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Oleh sebab itu tanggung jawab berhasil tidaknya pembangunan tidak saja ditangan pemerintah tetapi juga ditangan masyarakat. Oleh karena itu kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan, dalam hal ini mencapai target pembangunan. Mengenai tingkat partisipasi, peneliti mewawancarai Pak. Jabir (tanggal 18 Desember 2024) selaku masyarakat Desa Akebay (Maitara Utara) yang mengatakan bahwa:

*“...kalo torang disini tu torang jaga terlibat, karena torang anggap untuk kemajuan di torang p daerah torang juga musti ikut serta dalam perencanaan pembangunan daerah yang di bahas di musrembang.”*

Pak Jabir Melanjutkan: *“Bagi saya tu kalo torang sadar bahwa kemajuan daerah itu bagian dari ikut serta torang, maka penting sekali untuk torang baku bantu..”*

Partisipasi masyarakat itu menjadi penting dalam keberhasilan suatu pembangunan yang direncanakan. Akan tetapi, anggaran menjadi sumber kendala untuk menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat, sehingga program yang di bahas dalam musrembang

tidak semua terlaksana di kecamatan Tidore Utara. Bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

#### **b. Partisipasi Non-Fisik (Pemikiran/Ide)**

Partisipasi masyarakat secara langsung dalam setiap proses pembangunan suatu masyarakat mutlak bagi tercapainya tujuan pembangunan. Idealnya partisipasi masyarakat yaitu usaha untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, sehingga proses pembangunan dapat meringankan beban dan akhirnya pembangunan itu dapat dirasakan secara adil dan sejahtera. Demikian pula secara sederhana dapat diketahui bahwa masyarakat hanya akan terlihat dalam aktivitas selanjutnya apabila mereka merasa ikut ambil dalam menentukan apa yang akan dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan wawancara pada tanggal 19 Desember 2024 dengan Ibu Irma selaku masyarakat di desa Maitara Tengah, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan yakni mengemukakan bahwa: *“pembangunan yang ada di Desa Maitara Tengah adalah hasil musrembang yang telah di laksanakan bersama masyarakat. Ide dan gagasan pembangunan yang di rencanakan semuanya penting, karena ide dan gagasan itu lahir karena kebutuhan masyarakat yang mendesak, diharuskan untuk segera direalisasikan”*

Berdasarkan wawancara diatas, yang di peroleh melalui informan dalam penelitian ini, maka di ketahui bahwa di kecamatan Tidore Utara partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan uang sangat rendah sekali karena masyarakat merasa dana yang ada selalu cukup untuk setiap proyek-proyek pembangunan yang di laksanakan atau di lakukan, dan masyarakat di kecamatan Tidore Utara mereka menganggap bahwa seluruh bagian pembangunan yang ada di lingkungan semuanya adalah tanggungan pemerintah setempat. Namun menariknya di salah satu desa di Akebay kecamatan Tidore Utara berdasarkan hasil wawancara dan observasi, bahwa masyarakat tidak terlalu berharap pada pemerintah, dikarenakan usulan yang dilakukan dalam musrembang semua tidak terrealisasi sehingga masyarakat Desa akebay berinisiatif sendiri untuk membangun Desa nya dengan anggaran yang mereka sediakan sendiri.

#### **c. Partisipasi Dalam Bentuk Barang**

Dana merupakan salah satu penggerak utama yang menentukan dalam penyelenggaraan pembangunan, tetapi yang tidak kalah penting juga adalah sumbangan materi berupa barang, biasanya di lakukan secara langsung dimana sumbangan materi atau barang tersebut di peruntukan untuk pembangunan yang bersifat fisik seperti pembangunan jalan, saluran air dan sarana- sarana umum lainnya.

Hasil wawancara dengan ketua pemuda yang dilakukan di kelurahan RUM Balibunga kecamatan Tidore Utara (tanggal 21 Desember 2024) yang mengatakan :

*“untuk partisipasi masyarakat selain tenaga dan yang lain, dalam bentuk barang juga bisa menjadi hal yang penting. Namun kami disini untuk partisipasi dalam bentuk barang itu masih sangat kurang, karena bagi masyarakat di kelurahan Balibunga hal itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah”*

Tingkat partisipasi masyarakat kecamatan Tidore Utara dalam bentuk barang berdasarkan pengamatan penulis dalam penelitian ini dan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, partisipasi masyarakat dalam bentuk barang masih tergolong rendah karena masyarakat lebih banyak berharap dari dana yang di sediakan oleh pemerintah.

#### **d. Partisipasi dalam Bentuk Tenaga**

Partisipasi tenaga yang dimaksudkan disini adalah bagaimana masyarakat terlibat secara langsung atau fisik dalam pelaksanaan pembangunan. Menurut hasil wawancara penulis menemukan bahwa bakti atau gotog royong sekali dalam seminggu atau minimal dua kali dalam sebulan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yaitu seperti gotong royong, pembangunan masjid, membersihkan saluran air, perbaikan jalan, serta kegiatan yang membutuhkan partisipasi langsung masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pak ketua RT 05 kelurahan mareku (pada tanggal 24 Desember 2024) beliau mengatakan bahwa

*“kalau partisipasi masyarakat dalam pembangunan selain berpartisipasi dalam memberikan ide/ pemikiran tentang program usulan mereka juga ikut berpartisipasi dalam bentuk tenaga, itu biasanya membantu pembersihan atau kerja bakti daerah yang akan di bangun. Tapi terkadang hanya orang-orang yang ada disekitar daerah itu yang hadir yang lain tidak hadir karna ada pekerjaan yang harus mereka selesaikan. Begitu juga kalau di daerah mereka kami juga datang kadang tidak datang”*

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat kecamatan Tidore Utara dalam bentuk tenaga dapat dilihat pada kegiatan- kegiatan kerja bakti. Seperti data yang diperoleh melalui informan, diketahui bahwa kegiatan yang melibatkan fisik atau tenaga masyarakat seperti gotong royong dalam membersihkan saluran air, perbaikan langsung dari masyarakat. Partisipasi Pembangunan tidak hanya pada saat pelaksanaan. Tapi juga perawatan dan pemeliharaan bangunan juga tetap merupakan partisipasi dari pembangunan.

Berdasarkan observasi langsung peneliti data yang diperoleh melalui informan dalam penelitian ini diketahui bahwa partisipasi dalam bentuk fisik (tenaga), yang sifatnya seperti gotong royong adalah merupakan suatu tradisi yang sudah turun-temurun bagi masyarakat di kecamatan tidore utara. Alasan lain adalah bahwa adanya suatu kebersamaan bagi masyarakat untuk membangun daerahnya namun belum maksimal atau masih tergolong rendah karena masih ada masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi seperti kerja bakti yang di lakukan masih banyak masyarakat yang tidak memberi diri untuk terlibat langsung dalam kerja bakti.

## **4.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Tidore Utara**

### **a. Faktor Internal**

#### **1. Faktor Kesadaran/ Kemauan**

Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat di kecamatan Tidore Utara dalam bentuk tingkat kemauan/kesadaran masyarakat. Dimana terlihat bahwa kesadaran masyarakat yang ada di kecamatan Tidore Utara sangat antusias untuk mengikuti proses perencanaan pembangunan itu sendiri. Kesadaran dan kemauan masyarakat yang mendorong untuk berpartisipasi dalam pembangunan mencapai jumlah yang baik. Alasan responden memberikan jawaban faktor kesadaran dan kemauan yang merupakan pendorong masyarakat untuk partisipasi dalam pembangunan karena adanya suatu kepedulian atau kesadaran untuk ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan tersebut.

#### **2. Faktor Pendidikan**

Dari uraian wawancara tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pulalah tingkat partisipasinya dalam dalam proses perencanaan pembangunan. Menurut keterangan dari hasil wawancara dengan beberapa responden yang memberikan jawaban yang kurang aktif, hal itu dikarenakan adanya suatu pekerjaan tertentu yang tidak dapat ditinggalkan, jika dibandingkan dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah maka dapat dilihat dengan jelas meskipun mereka tidak dapat berpartisipasi dalam bentuk pemberian saran/ide tetapi mereka lebih aktif berpartisipasi dalam bentuk pemberian tenaga. Melihat kenyataan ini maka jelas bahwa tingkat pendidikan masyarakat turut berpengaruh terhadap partisipasinya dalam pembangunan yang berarti bahwa semakin

tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi pula partisipasinya dalam pembangunan, khususnya dalam pemberian ide-ide/pikiran.

### 3. Faktor Pekerjaan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahawa di kecamatan Tidore Utara perbedaan keaktifan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan bila dilihat dari jenis pekerjaan biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan lebih banyak waktunya untuk berpartisipasi pada suatu kegiatan perencanaan pembangunan.

Masyarakat di kecamatan Tidore Utara yang bekerja di sektor pertanian dan nelayan memiliki keaktifan berpartisipasi yang relatif lebih tinggi dibandingkan mereka yang bekerja di sektor industri. Relatif rendahnya partisipasi masyarakat yang bekerja di sektor industri ini diduga karena kendala jam kerja di tempat mereka bekerja. Sektor pertanian (petani) dan perikanan (nelayan) jam kerjanya lebih fleksibel jika dibanding jadwal kerja di sektor industri. Hal ini mengakibatkan tingkat kehadiran masyarakat yang bekerja di sektor industri rendah karena jadwal bekerja berbenturan dengan waktu pelaksanaan Musrenbang.

#### **b. Faktor Eksternal**

##### 1. Faktor Kepemimpinan

Telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa partisipasi masyarakat dan pembangunan di kecamatan Tidore Utara pada khususnya tidak timbul begitu saja melainkan terpengaruh oleh beberapa faktor dan salah satunya adalah kepemimpinan pemerintah setempat.

Berhasilnya masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan diperlukan adanya kepemimpinan yang dapat menyatu dengan sikap dan karakter masyarakat setempat, karena dengan kepemimpinan yang baik dan terarah oleh pemerintah maka jelas akan mendorong masyarakat untuk patuh dan taat kepada pemerintah dan kebijaksanaan dalam pembangunan akan dilaksanakan dengan baik tanpa merasa *unsure* paksaan atau keterpaksaan.

##### 2. Peralatan/ Fasilitas

Dalam pelaksanaan tugas kepala kecamatan dan perangkatnya, dibutuhkan kantor Kecamatan yang merupakan tempat untuk melaksanakan tugas pengelolaan, pelaporan, pencatatan dan berbagai kegiatan lainnya. Kantor Kecamatan sebagai pusat kegiatan pemerintah Kecamatan merupakan sarana yang sangat penting bagi kepala Kecamatan dalam melaksanakan fungsi dan perannya sebagai seorang pemimpin harus dapat

memberikan teladan yang baik sehingga dapat tercipta berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat di kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan.

Perlengkapan kantor kecamatan adalah semua peralatan untuk menjamin kelancaran seluruh kegiatan pemerintah. Secara keseluruhan pada lokasi penelitian perlengkapan dikantor kecamatan sudah memadai. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintah, khususnya pada upaya peningkatan pelayanan administrative kepada masyarakat. Oleh skarena itu menurut penulis, peralatan/fasilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepala kecamatan dan aparatnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Partisipasi masyarakat kelurahan/desa di kecamatan Tidore Utara dalam mengikuti pelaksanaan rapat rencana pembangunan di Kelurahan/ Desa masih kurang aktif hal ini bisa di lihat dari daftar hadir musrenbang di tingkat Kelurahan/ Desa, dan masih perlu di tingkatkan karna masih banyak masyarakat yang belum berpartisipasi dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan perencanaan program pembangunan yang akan di laksanakan setiap tahunnya. Hal yang menjadi kendala sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dan kurang aktif dalam mengikuti rapat perencanaan pembangunan adalah padatnya waktu kerja masyarakat sehingga jadwal yang di tetapkan oleh pemerintah bertabrakan dengan waktu kerja masyarakat tetapi dari segi pekerjaan lain masyarakat masi menyempatkan waktu untuk hadir.

Berdasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dengan ini disarankan kepada pemerintah kecamatan Tidore Utara agar senantiasa memperbaiki dan mengejar pendidikan dalam segala modelnya. Disamping itu perlu pula diadakan pembinaan terhadap masyarakat yang mata pencahariannya sebagai petani dan nelayan sehingga dapat memperbaiki pendapatan mereka.

## DAFTAR REFERENSI

- Adimiharja, K., & Hikmat, H. (2003). *Participatory research appraisal (pengabdian dan pemberdayaan masyarakat)*. Humaniora.
- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan pedesaan dan perkotaan*. Graha Ilmu.
- Hasan, S. (2005). *Sosiologi untuk masyarakat Indonesia*. Bina Aksara.
- Isbandi, R. (2007). *Perencanaan partisipatoris berbasis aset komunitas: Dari pemikiran menuju penerapan*. FISIP UI Press.
- Junaedi, A. T., Hadiwijoyo, D., Troena, E. A., & Triuwono, I. (2012). Analisis pengaruh kualitas pelayanan, keadilan dan kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah bank Syariah (studi pada nasabah bank Syariah di provinsi Riau). *Jurnal Aplikasi Manajemen*. (Volume dan halaman tidak disebutkan – mohon dilengkapi jika ada)
- Khoiruddin. (2000). *Partisipasi masyarakat pedesaan*. Bumi Aksara.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.
- Laksana, N. S. (2012). *Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat desa dalam program desa siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta* (Skripsi, Universitas Airlangga).
- Mardijono. (2008). *Persepsi dan partisipasi nelayan terhadap pengelolaan kawasan konservasi laut kota* (Disertasi, Universitas Diponegoro).
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2012). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. CV Alfabeta.
- Riyadi, & Bratakusumah, D. S. (2005). *Perencanaan pembangunan daerah: Strategi menggali potensi dalam mewujudkan otonomi daerah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sirajuddin, Sukriono, D., & Winardi. (2011). *Hukum pelayanan publik (berbasis partisipasi dan keterbukaan informasi)*. Setara Press.
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian administrasi* (Cet. 5). Liberty.
- Suharto, E. (2006). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Refika Aditama.
- Sumaryadi. (2005). *Perencanaan pembangunan daerah otonom dan pemberdayaan masyarakat*. CV Citra Utama.
- Supeno, E. (2005). Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan upaya mewujudkannya. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga*, 18(2), 1–5.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.